

**KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
DAERAH PERBATASANDI KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2020**

Oleh :

**YUSAK<sup>1\*</sup>**

NIM. E1042131008

Lukman Djafar<sup>2</sup>, Ema Rahmaniah<sup>2</sup>

\*Email: [uyiyusak@gmail.com](mailto:uyiyusak@gmail.com)

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

**ABSTRAK**

Daerah perbatasan diharapkan sebagai beranda depan negara, sekaligus pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Kenyataan menunjukkan bahwa daerah perbatasan sering identik dengan daerah tertinggal. Oleh karena itu memerlukan upaya-upaya intervensi yang menyeluruh, agar daerah perbatasan benar-benar sebagai beranda depan negara. Terkait dengan ini diperlukan langkah awal identifikasi kondisi daerah tertinggal sebagai dasar penemuan program pemberdayaan atau pembangunan yang responsif dan sesuai dengan kondisi yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif mencoba memaparkan permasalahan, kebutuhan, dan sumber daya di daerah perbatasan, khususnya di Desa Sungkung II Kecamatan Siding kabupaten Bengkayang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) sumber-sumber pelayanan masyarakat yang bisa diakses penduduk umumnya masih sangat terbatas; 2) kemampuan penduduk untuk mengelola sumber daya alam (pertanian dan perkebunan) belum cukup memadai; 3) sumber daya sosial khususnya yang didasarkan pada keagamaan belum mampu didayagunakan untuk penanggulangan masalah kesejahteraan sosial; dan 4) masih minimnya infrastruktur fisik desa menjadi penghambat kemajuan desa. Berdasarkan hal itu tulisan ini mengajukan saran beberapa program pembangunan yang perlu diluncurkan di wilayah perbatasan.

Kata kunci: Masalah kesejahteraan sosial, sumber daya, pemberdayaan masyarakat

## ABSTRACT

Border areas should serve as a window of a country and a gate for economic and trade activities with the neighboring countries. The practice, however, often shows that border areas are mainly associated with underdeveloped areas. Therefore, a holistic intervention is required to promote these areas as the window of the country. For that reason, the first step is to identify these underdeveloped areas as a basis for finding responsive and appropriate development or empowerment programs in accordance with existing conditions. The present research employed a qualitative approach. It tried to elaborate issues, needs, and resources in border areas, especially in Sungkung II Village, Siding Sub-district, Bengkayang Region. Results of the research indicated that 1) resources for public services were hardly accessed by the local people; 2) the capability of the local people to manage natural resources (agriculture and plantation) was not sufficient; 3) social resources, particularly related to religion were not empowered to overcome issues related to social welfare; and 4) physical infrastructure of the village was limited and it potentially inhibited the progress of the village. Based on these findings, this research proposes several development programs that need to be launched in border areas.

**Keywords:** Social welfare issues, resources, people empowerment



## A. PENDAHULUAN

Daerah perbatasan adalah wilayah darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar (UU 26/2007, tentang Penataan Ruang). Ada 38 wilayah kabupaten negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan di Indonesia, yakni 27 wilayah di perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan antara lain termasuk daerah tertinggal. Sebagai daerah tertinggal, ciri utamanya adalah kondisi sosial budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur yang masih tertinggal dibanding wilayah lainnya.

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat perbatasan, menurut beberapa literatur adalah masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Kondisi ini mendorong mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya; termasuk kegiatan ilegal lain yang terkait dengan aspek politik dan keamanan.

Pembicaraan mengenai wilayah perbatasan tidak dapat dipisahkan dari kesan terisolir, terbatas, dan jauh dari perhatian pemerintah. Kesan ini tidak dapat disalahkan karena demikianlah adanya di hampir seluruh wilayah perbatasan Indonesia. Kondisi memprihatinkan ini disebabkan oleh kesalahan paradigma yang dibangun secara akademis dan praktis yang menganggap bahwa wilayah perbatasan berada di pedalaman atau pinggiran yang sekaligus diposisikan di belakang atau terbelakang sehingga kurang penting diperjuangkan.

Pendekatan yang dilakukan terhadap kawasan perbatasan sering mencampur-adukan antara masalah kedaulatan dengan masalah kewilayahan. Untuk itu maka pendekatan "security approach" perlu diubah kepada konsep "prosperity approach" yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Diharapkan masyarakat perbatasan akan semakin kuat rasa identitas kebangsaan sebagai bagian dari NKRI. Memperhatikan permasalahan

perbatasan tersebut, maka arah kebijakan pemberdayaan kawasan perbatasan menurut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode 2004-2008 lebih ditekankan pada upaya percepatan pemberdayaan kawasan perbatasan, yakni sebagai pintu masuk gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Kawasan perbatasan diharapkan sebagai beranda depan negara, sekaligus pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Hal yang ingin diwujudkan adalah peningkatan membentuk Dinas pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal (DPMPD). DPMPD ini bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan di daerah perbatasan yang dikelola oleh berbagai sektor. Di sektor sosial, dalam penanganan permasalahan sosial diperlukan upaya yang sistematis dan tepat sasaran. Hal ini bisa dilakukan bila didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan reliable sesuai dengan kondisi obyektif wilayah perbatasan.

Tersedianya data dan informasi yang akurat dan reliable, akan menjadi acuan dalam penentuan kebijakan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah yang dibutuhkan masyarakat wilayah perbatasan.

Ada beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang termasuk wilayah perbatasan, salah satunya adalah Kabupaten Bengkayang. Kabupaten Bengkayang ini sebelumnya merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sambas. Pada tahun 1999 dilakukan pemekaran Kabupaten Sambas menjadi dua kabupaten (Sambas dan Bengkayang) dan satu kota (Singkawang).

Sebagai sebuah kabupaten pemekaran, Bengkayang juga melakukan pemekaran wilayah dari 8 (delapan) kecamatan sebelumnya, menjadi 17 kecamatan, termasuk Kecamatan Siding yang sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Jagoi Babang. Sebagai kabupaten baru, Bengkayang masih mengalami berbagai kekurangan baik yang terkait dengan data base bagi

perencanaan pembangunan, maupun masalah kebutuhan SDM yang memadai. Fenomena yang menyertai Sehubungan hal-hal tersebut di atas, terutama guna menunjang rancangan program sosial bagi wilayah perbatasan terutama program pemberdayaan masyarakat, maka dilakukan studi tentang masalah, Dinas pemberdayaan masyarakat dan sumber pemertintah desa di daerah perbatasan.

Namun, apakah kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dibentuk tersebut dalam realisasinya sudah menjalankan perannya dengan baik dalam pemberdayaan masyarakat? Tentu perannya akan terlihat apabila dalam membuat kebijakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya pembangunan masyarakat desa di daerah perbatasan. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul: "Kebijakan Pemerdayaan Masyarakat Desa Daerah Perbatasan Di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 (Studi Kasus Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Sungkung II Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang)

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Definisi Konsep

Suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. Proses pengubahan definisi konseptual yang lebih menekankan kriteria hipotetik menjadi definisi operasional disebut dengan operasionalisasi variabel penelitian (Saifuddin, 2014: 74) Dalam hal penulisan skripsi ini, penulisan definisi operasional mengacu kepada Indikator-Indikatornya:

Dalam penelitian ini, indikator kebijakan menggunakan teori dari Grindle (dalam M. Arsyad: 2006)

- 1) Manfaat yang diterima oleh masyarakat melalui kebijakan yang ditetapkan
- 2) Kebijakan yang menghasilkan tingkat perubahan terhadap kondisi yang ada saat ini
- 3) Kebijakan tepat atau tidak
- 4) Para pelaksana kebijakan telah disebutkan dengan jelas atau belum
- 5) Sumber

daya yang memadai untuk mendukung kebijakan

2. Dalam penelitian ini, indikator pemberdayaan masyarakat menggunakan teori dari Mardikanto dan Soebiato, 2015)

- 1) Kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya
- 2) Kemampuan membeli komoditas kecil
- 3) Kemampuan membeli komoditas besar
- 4) Kesadaran hukum dan politik
- 5) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes
- 6) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

1. Pengertian Kebijakan Kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan karena kebijakan adalah perintah dari atasan. Sedangkan kebijaksanaan adalah perubahan peraturan yang sudah ditetapkan oleh atasan sesuai dengan situasi dan kondisi (Inu Kencana Syafiie, 2013: 168).

2. Kebijakan (*policy*) umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Namun, kebijakan bukanlah sekedar suatu keputusan

yang ditetapkan. Rose, (1969:x, dalam Muchlis Hamdi, 2015:36)

mengartikan kebijakan lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, daripada hanya sekedar suatu keputusan. Pendapat lain dikemukakan oleh Friedrich (1963:79, dalam Muchlis Hamdi, 2015:36) yang memandang kebijakan sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud (Muchlis Hamdi, 2015:36). Mengacu pada Hogman dan Gunn, Bridgman dan Davis (2004) menyatakan bahwa kebijakan publik sedikitnya mencakup hal-hal seperti: (1) Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau

pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai. (2) proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih. (3) Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. (4) Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumberdaya lembaga dan strategi pencapaian tujuan. (5) Keluaran (output) yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu (Syamsu Alam, 2012).

3. Dari berbagai pandangan tentang pengertian kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang ditetapkan oleh atasan atau pemerintah dengan suatu tujuan tertentu dalam bentuk perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.
4. Pelaksanaan kebijakan  
Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Nuryatin dkk, 2012: 1197) pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk

undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk men-strukturkan ataumengatur proses implementasinya.

Asna Aneta (2010: 55) juga menjelaskan bahwa pelaksanaan atau implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan bahwa

pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Menurut Grindle (dalam M. Arsyad: 2006) bahwa proses implementasi kebijakan publik hanya dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari sasaran tersebut. Inilah syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun. Aktivitas penerapan implementasi kebijakan menurut Grindle terdiri dari pelaksanaan kebijakan *Contenty* yang didalamnya ada enam variabel yaitu:

- 1) Pihak yang berkepentingan dipengaruhi
- 2) Manfaat yang akan dihasilkan

- 3) Derajat perubahan yang diinginkan
  - 4) Kedudukan pembuat kebijakan
  - 5) Pelaksana kebijakan
  - 6) Sumber daya yang dikerahkan
5. Pemberdayaan Masyarakat

#### 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat jika ditelaah sebenarnya berangkat dari pandangan yang menempatkan manusia sebagai subjek dari dunianya sendiri. Pola dasar gerakan pemberdayaan ini mengamanatkan kepada perlunya *power* dan menekankan keberpihakan kepada kelompok yang tak berdaya (Zubaedi, 2014: 72-73). Menurut Adi Fahrudin (2012: 67-68) pemberdayaan adalah proses meningkatkan kekuatan pribadi, antarpribadi, atau politik sehingga individu-individu, keluarga-keluarga, dan komunitas-komunitas dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki situasisituasi mereka (Guttierrez dalam DuBois & Miley, 2005). Menurut Robbins, Chettarjee, dan Canda (1998, dalam Fahrudin



2012) pemberdayaan menunjukkan proses yang dengan itu individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh kekuatan, akses pada sumber-sumber, dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri.

Dalam melakukan itu, mereka memperoleh kemampuan untuk mencapai aspirasi-aspirasi dan tujuan-tujuan pribadi dan kolektif mereka yang tinggi. Sedangkan menurut Mardikanto & Soebiato (2015:61) pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dana atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakat dalam arti luas. Dengan pemahaman seperti itu,

pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/ upgrade utilitas dari obyek yang diberdayakan. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Dalam kaitan ini, usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional, bahkan menjadi titik pijak bagi program nasional. Di sini masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang pembangunan dan perikehidupan mereka sendiri. Selain itu mereka juga menemu-kenali solusi yang tepat dan mengakses sumber daya yang diperlukan, baik sumber daya eksternal maupun sumber daya milik masyarakat itu sendiri (Mardikanto dan Soebiato: 2015).

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian

menjadi basis program daerah, regional dan hankan nasional. Pemahaman ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran fasilitator. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal atau yang tidak berkelanjutan (Mardikanto dan Soebiato: 2015).

## 2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan masyarakat

Mathews menyatakan bahwa: *“prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”*. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian “prinsip” dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan (Mardikanto dan Soebiato, 2015:105).

Meskipun “prinsip” biasanya diterapkan dalam dunia akademis,

Leagans (1961, dalam Mardikanto &Soebiato, 2015:105) menilai bahwa setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip prinsip pemberdayaan. Tanpa berpegang pada prinsip-prinsip yang sudah disepakati seorang penyuluh (apalagi administrator pemberdayaan) tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik.

Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip:

- 1) *Mengerjakan*, artinya, kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/ menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu lebih lama;
- 2) *Akibat*, artinya, kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat; karena, perasaan

senang/puas atau tidak-senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/pemberdayaan di masa-masa mendatang;

- 3) *Asosiasi*, artinya, setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan/ menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan/peristiwa yang lainnya. Misalnya, dengan melihat cangkul orang diingatkan kepada pemberdayaan tentang persiapan lahan yang baik; melihat tanaman yang kerdil/subur, akan mengingatkan kepada usaha-usaha pemupukan, dll.

### 3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan

merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Terkait dengan hal ini, pembangunan, apapun pengertiannya yang diberikan terhadapnya, selalu merujuk pada upaya perbaikan, terutama perbaikan pada mutu-hidup manusia, baik

secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial-budayanya.

Tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto & Soebiato (2015: 111-112) meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:

- 1) Perbaikan pendidikan (*better education*). Dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat;
- 2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*). Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran;
- 3) Perbaikan tindakan (*better action*). Dengan berbekal

- perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik;
- 4) Perbaikan kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik;
- 5) Perbaikan usaha (*better business*). Perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan;
- 6) Perbaikan pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya;
- 7) Perbaikan lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas;
- 8) Perbaikan kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat;
- 9) Perbaikan masyarakat (*better community*). Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.
4. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat
- Menurut Soetomo (2006: 198-200) dalam pendekatan pemberdayaan, yang dibutuhkan adalah tumbuhnya kapasitas lokal untuk menghasilkan perbaikan yang bersifat mandiri, sukses program tidak diukur dari sudut organisasi penyelenggara tetapi pada kesinambungan manfaat program bagi masyarakat baik pada saat

maupun terutama setelah program berakhir.

Program yang berhasil menumbuhkan perbaikan dalam jangka panjang adalah program yang mampu mendorong perbaikan berkelanjutan secara mandiri baik dalam hal perbaikan kesejahteraan masyarakat maupun dalam peningkatan kapasitas masyarakat untuk membangun. Dalam hal ini yang dihasilkan adalah keberlanjutan ekonomi dalam bentuk manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan sosial dalam bentuk kapasitas masyarakat untuk membangun secara mandiri (Soetomo, 2006: 198-200).

Pemerintah mempunyai kewajiban moral untuk menjamin agar setiap solusi yang dihasilkan sepenuhnya konsisten dengan norma keadilan dan kejujuran, dan dicapai melalui proses yang sepenuhnya konsisten dengan norma dan etika demokrasi. Pemerintah akan bertindak untuk memfasilitasi solusi-solusi atas masalah-masalah publik, tetapi ia juga akan bertanggung jawab untuk memastikan agar solusi-solusi itu konsisten dengan

kepentingan publik (Ingraham dan Ban 1998; Ingraham dan Rosenbloom 1989, dalam Denhardt dan Denhardt, 2013: 96).

Axinn (1998, dalam mardikanto dan Soebiato, 2015: 159) mengartikan pendekatan sebagai suatu gaya yang harus diikuti oleh semua pihak dalam system yang bersangkutan (*the style of action within a sysem*). Pendekatan ibarat bunyi kendang yang harus diikuti penabuh gamelan dan penarinya. Terkait dengan kegiatan pemberdayaan, Nagel (1997, dalam mardikanto dan Soebiato, 2015: 159) mengemukakan bahwa, apapun pendekatan yang akan diterapkan, harus memperhatikan:

- 1) Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan;
- 2) System transfer teknologi yang akan dilakukan;
- 3) Pengembangan Sumberdaya manusia/fasilitator yang akan melakukan pemberdayaan;
- 4) Alternatif organisasi pemberdayaan yang akan diterapkan.

## 5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Mardikanto dan Soebiato (2015: 167-168) menjelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki, oleh karena itu, pengertian strategi sering rancu dengan: metoda teknik, taktik.

Tentang hal ini secara konseptual, strategi sering dikaitkan dengan beragam pendekatan, seperti:

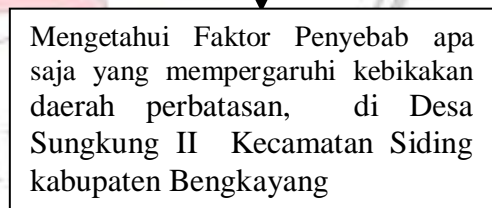
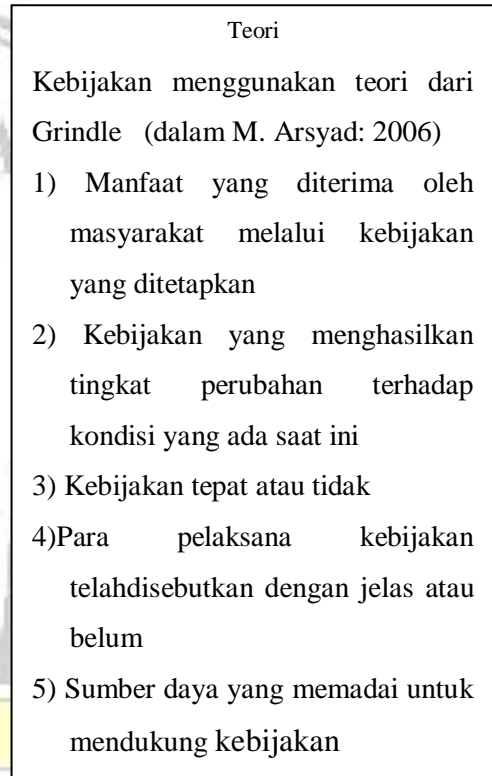
- 1) Strategi sebagai suatu rencana. Sebagai suatu rencana, strategi merupakan pedoman atau acuan yang dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan, demi tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan. Dalam hubungan ini, rumusan strategi senantiasa

memperhatikan *kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal* yang dilakukan oleh para pesaingnya.

- 2) Strategi sebagai kegiatan. Sebagai suatu kegiatan, strategi merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi, atau perusahaan untuk memenangkan persaingan, demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau telah ditetapkan.
- 3) Strategi sebagai suatu instrument. Sebagai suatu instrumen, strategi merupakan alat yang digunakan oleh semua unsur pimpinan organisasi/ perusahaan, terutama manajer puncak, sebagai pedoman sekaligus alat pengendali pelaksana kegiatan.
- 4) Strategi sebagai suatu system. Sebagai suatu sistem, strategi merupakan satu kesatuan rencana dan tindakan-tindakan yang komprehensif dan terpadu, yang diarahkan untuk menghadapi tantangan-

tantangan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

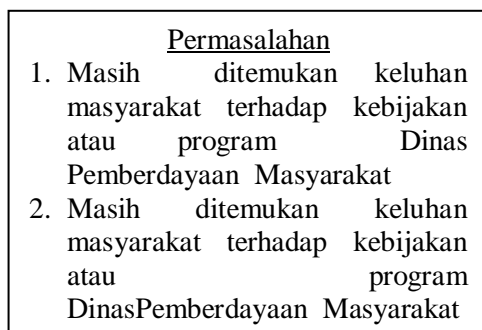
- 5) Strategi sebagai pola pikir. Strategi pola pikir, strategi merupakan suatu tindakan yang dilandasi oleh wawasan yang luas tentang keadaan internal maupun eksternal untuk rentang waktu yang tidak pendek, serta kemampuan pengambilan keputusan untuk memilih alternatif-alternatif terbaik yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada, yang di samakan dengan upaya untuk menutup kelemahan.



Sumber: Data Olahan Penulis

Gambar 1

Bagan Kerangka Pikir



### C. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian tentang “Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa di daerah Kabupaten Bengkayang di daerah Tertinggal Tahun 2020.” peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah,

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dan sesuai dengan pengertian deskriptif menurut Suryana (2010) yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifatsifat suatu fenomena, dan dalam pelaksanaannya dilakukan melalui teknik survey, studi kasus, studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tingkah laku, dan analisis dokumenter.

Sesuai dengan pengertian diatas bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada latar alamiah dan kemauan alamiah berdasarkan dengan fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana kebijakan atau program pemberdayaan masyarakat desa di daerah perbatasan (tertinggal) dan ini didasarkan pada ketertarikan alamiah penulis untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada.

#### **D. LOKASI PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Dan Pemerintahan Desa di daerah Teringgal Kabupaten Bengkayang, dengan beberapa pertimbangan yang mendasari pilihan lokasi ini adalah:

- 1) Adanya kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa di daerah Kabupaten Bengkayang di daerah Teringgal.
- 2) Masih ditemukan keluhan masyarakat terhadap kebijakan atau program Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa di daerah Teringgal.
- 3) Tersedianya data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penelitian.

#### **4.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bengkayang**

Keadaan Geografis Kabupaten Bengkayang Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di sebelah utara Provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, Kabupaten Bengkayang



terletak di 0°33'00" Lintang Utara sampai 1°03'00" Lintang Utara dan 108°03'00" Bujur Timur sampai 110°01'00" Bujur Timur. Secara keseluruhan, luas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebesar 5.396,30 km<sup>2</sup> atau sekitar 3,68 persen dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menjadikan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten dengan cakupan wilayah terkecil di Kalimantan Barat. Pada tahun 2008, daerah pemerintahan Kabupaten Bengkayang dibagi menjadi 17 kecamatan. Dari sejumlah kecamatan yang ada, Kabupaten Bengkayang dibagi lagi menjadi 2 kelurahan dan 122 desa definitif. Dilihat dari luas masing-masing kecamatan, Jagoi Babang merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bengkayang dengan cakupan wilayah sebesar 655 km<sup>2</sup> atau sekitar 12,14 persen dari luas Kabupaten Bengkayang keseluruhan dan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,35 km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 0,86 persen dari total luas Kabupaten Bengkayang. Dilihat

dari jarak tempuh terjauh dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten di Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Siding adalah kecamatan dengan jarak tempuh terjauh, yaitu sekitar 103,68 km disusul Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Sungai Raya.

Walaupun hanya sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkayang yang merupakan wilayah perairan laut, Kabupaten Bengkayang juga memiliki sejumlah pulau, yaitu sebanyak 12 pulau. Dari sejumlah pulau tersebut, ada sebanyak 5 pulau masih belum berpenghuni dan 7 pulau sudah berpenghuni. Semua pulau yang ada terletak di wilayah perairan Laut Natuna. Pulau terbesar yang berpenghuni adalah Pulau Lemukutan dan Pulau Penatah Besar. Perairan sebelah barat dan timur pulau-pulau kecil Bengkayang merupakan pantai yang berarus dengan kecepatan yang relatif tinggi berkisar antara 0,45 - 0,75 m/dt rata-rata bulanannya. Pasang surut (pasut) di perairan Bengkayang bersifat campuran, yaitu di bagian utara tipe

ganda lebih dominan (diurnal), dan arah selatan tipe tunggal lebih dominan (semi diurnal). Kisaran pasut pada waktu pasang purnama mencapai 1,2-1,7 m dan pada pasang perbani sekitar 0,4-0,8 m.

KEPALA DINAS

Tinggi gelombang rata-rata di wilayah ini berkisar antara 10–30 cm dan yang dominan dari arah barat laut. Pada musim utara (Nopember-Februari), tinggi gelombang dapat mencapai rata-rata 0,75 m.

Secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

**TABEL 4.1**  
**BATAS WILAYAH**

No	Bagian Wilayah	Batas wilayah
1	Utara	Serawak-Malaysia Timur dan Kabupaten Sambas
2	Selatan	Kabupaten Pontianak
3	Barat	Laut Natuna dan Kota Singkawang
4	Timur	Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak

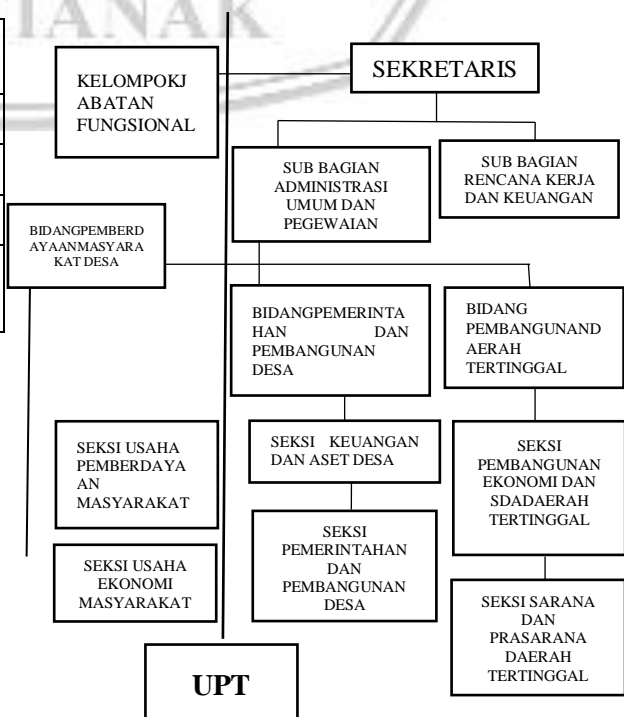
**4.2 Keadaan Sosial dan Kebudayaan**

Desa Sungkung didominasi oleh suku Dayak (Dayak Bidayeh dan Dayak (Bekati) yang menempati wilayah pegunungan, etnis Melayu yang berada di wilayah pesisir dan

etnis Tionghoa berbahasa Tionghoa yang menempati wilayah perkotaan serta etnis pendatang yang rata-rata berasal dari Jawa tinggal di wilayah transmigrasi/paket.

Sedangkan penduduk asli di pedalaman adalah suku Dayak dengan bahasa dayaknya. Penduduk Desa Sungkung menganut kepercayaan Katholik Roma, Kristen Protestan, dan Aliran Kepercayaan yang masih dipercaya oleh Adat Istiadat setempat.

**Tabel 4.1 Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang**



## D. PEMBAHASAN DAN HASIL

### 5.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka mendukung penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diawali dengan penyusunan Rencana Kerja bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dibidang pemberdayaan masyarakat, bidang Kelembagaan

Masyarakat dan Bidang Pemerintahan Desa dan tugas lainnya sesuai dengan kebijakan Bupati Bengkayang. Lebih lanjut, usulan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas baik terhadap urusan wajib maupun urusan pilihan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang akan dilakukan dalam kurun waktu (1) satu tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang merupakan rancangan Rencana Kerja jangka pendek yang memuat tentang program dan kegiatan baik yang bersifat belanja langsung maupun belanja tidak langsung pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang Tahun 2019.

Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten  
Bengkayang bertujuan untuk  
peningkatan pemberdayaan  
masyarakat dalam kurun waktu satu  
tahun sesuai dengan tujuan dan  
sasaran yang ingin dicapai  
Badan Pemberdayaan Masyarakat  
dan Pemerintahan Desa dalam  
kebijakan strategis Pemerintah  
Kabupaten Bengkayang.

## **5.1 Pembahasan**

### **5.1.1. Tujuan Program dan Sasaran DPMPD**

Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan kearah mana sebuah organisasi itu akan bergerak dan bagaimana cara menuju kearah tersebut. Oleh karena itu Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang menentukan Visi dan Misi yang merupakan suatu proyeksi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

### **5.1.2. Pelaksanaan Fungsi DPMPD dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Fungsi pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang cukup penting dalam mendekati pemerintah dengan rakyat, dimana semua program pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan, meningkatkan taraf hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **5.1.3. Program BPMPD dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Perbatasan**

Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berbentuk prioritas program yang disesuaikan dengan kondisi daerah serta visi dan misi karena arah kebijakan ada di dalam visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

### **5.1.4. Program Pemberdayaan Masyarakat**

- 1) Penilaian Lomba Desa / Kelurahan Tingkat kabupaten  
Lomba Desa yang menjadi bagian dari kebijakan prioritas

program BPMPD tidak berjalan sesuai dengan harapan, Sehingga berdasarkan hasil wawancara tersebut, untuk tahun 2018 ataupun tahun 2019, sehingga sampai sekarang dilakukan lagi lomba desa khususnya Desa Sungkung yang merupakan Desa yang paling dekat dengan wilayah Malaysia, kegiatan lomba yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang akan membuat masyarakat daerah perbatasan bahu membahu untuk memajukan desanya masing-masing, hal ini akan membuat masyarakat saling berinteraksi dan bersosialisasi.

## 2) DAK PNPM Mandiri Perdesaan

Program DAK PNPM merupakan program dari Pusat yaitu Kementerian Desa yang masuk dalam Rencana Kerja BPMPD, sesuai dengan yang dikatakan oleh Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan

Program DAK PNPM menjadi program unggulan di Kecamatan Siding yang mengutamakan pendidikan dan

kesehatan. Untuk pendidikan sangat bermanfaat bagi anak-anak yang putus sekolah dan hampir putus sekolah, bantuannya berupa perlengkapan alat tulis dan seragam sekolah, di samping itu guru honor juga mendapatkan bantuan berupa biaya transportasi. Terkait dengan Kesehatan ada bantuan kepada ibu hamil, bayi yang sedang menyusui, yang kekurangan gizi maupun yang berkebutuhan khusus.

## 3) Penyusunan Buku Profil Desa,

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Amir, Profil Desa tidak dibuat oleh BPMPD, tetapi yang membuat adalah Badan Pengelola Perbatasan, profil dibuat dalam bentuk buku, sehingga menyulitkan peneliti ketika ingin meminta profil Kecamatan Siding.

Untuk Profil Desa khususnya Desa Sungkung II tidak bisa ditanyakan karena keadaan Kantor Desa Sungkung 11 dalam keadaan tidak beroperasi.

## 4) Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong

Program Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong dilakukan secara bergilir, dalam satu tahun hanya satu kecamatan yang mengadakan program tersebut. Untuk Kecamatan Siding belum mendapat giliran, sehingga tidak bisa diketahui proses berjalannya program tersebut.

5) Bimtek Peningkatan Kelembagaan Masyarakat Desa

Hasil wawancara mengenai Bimtek Peningkatan Kelembagaan Masyarakat Desa dengan Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Tidak semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Siding memilikilembaga masyarakat.

Berdasarkan wawancara diatas, Kecamatan Ketungau Hulu tidak memiliki lembaga masyarakat, lembaga yang ada hanyalah lembaga keagamaan dan lembaga adat yang memang sudah sejak lama melekat di desa

6) Organisasi Kepemudaan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Kepemudaan

kurang berjalan dengan optimal, hal tersebut di karenakan anggaran yang tidak memadai, anggaran paling besar yang diberikan oleh Pemerintah sejumlah Rp 2.500.000 dirasakan masih belum bisa memenuhi anggaran Organisasi Kepemudaan, hal ini diperparah dengan jumlah pemuda yang semakin berkurang karena banyak pemuda Desa Tertinggal yang memilih untuk bekerja di Malaysia.

Kurangnya lowongan pekerjaan di Indonesia membuat banyak pemuda memilih untuk pergi ke Negara tetangga untuk mencari pekerjaan, perbedaan upah juga membuat banyak masyarakat memilih untuk mencari rezeki di Malaysia, terlebih untuk makan juga ditanggung ketika bekerja di Malaysia. Di samping perbedaan upah pekerja, tidak semua masyarakat bisa bekerja di perusahaan sawit Indonesia karena ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Tentu hal ini menjadi salah satu permasalahan

yang serius sehingga program pemberdayaan Bimtek Organisasi Kepemudaan tidak berjalan dengan optimal.

#### 5.4.1. Kebijakan

Kebijakan merupakan keputusan yang diambil pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berbentuk prioritas program yang disesuaikan dengan kondisi daerah serta visi dan misi karena arah kebijakan ada di dalam visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

1. Manfaat yang diterima oleh masyarakat melalui kebijakan yang ditetapkan Kebijakan yang menghasilkan program dibuat oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung dengan adanya program

yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satu manfaat yang diterima oleh masyarakat secara langsung adalah tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Karena program yang sampai saat ini masih berjalan adalah program (DAU). Program ini merupakan pengganti dari program PNPM Mandiri. Program Dana Alokasi Umum masih menjadi program unggulan di Kecamatan Siding karena program ini mengutamakan Pendidikan dan kesehatan masyarakat. Untuk pendidikan sangat bermanfaat bagi anak-anak yang putus sekolah dan hampir putus sekolah, bantuannya berupa perlengkapan alat tulis dan seragam sekolah, di samping itu guru honor juga mendapatkan bantuan berupa biaya transportasi. Terkait dengan Kesehatan.

2. Kebijakan yang menghasilkan tingkat perubahan terhadap kondisi yang ada saat ini Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik lagi. Untuk pendidikan,

anak-anak yang awalnya hampir putus sekolah dan sudah putus sekolah saat ini sudah melanjutkan pendidikannya lagi. Hal ini karena adanya program Dana Alokasi Umum yang dibuat oleh pemerintah. Program ini tentu menghasilkan perubahan yang tidak hanya dirasakan saat ini saja, tetapi perubahan tersebut dirasakan dimasa yang akan datang. Anak-anak dan remaja merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa ini, dengan tersedianya fasilitas pendidikan akan membuat wawasan semakin luas. Terlebih daerah perbatasan sampai saat ini masih disebut sebagai daerah yang terbelakang dan terisolir, hal ini memang benar adanya karena akses transportasi yang sulit dijangkau dan kualitas pendidikan yang masih rendah. Program diperbatasan menjadi sangat penting untuk menghasilkan tingkat perubahan yang lebih baik lagi, karena daerah perbatasan atau tertinggal merupakan gerbang pemisah antar negara Indonesia dengan

Malaysia. Dengan adanya program pemerintah di bidang pendidikan, anak-anak bisa mengenyam pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi, agar kualitas sumber daya manusia bisa menjadi lebih baik sehingga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

3. Kebijakan tepat atau tidak Kebijakan yang berbentuk program dari pemerintah sudah tepat dan bermanfaat, seperti program Dana Alokasi Umum yang lebih menonjolkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, sehingga menghasilkan tingkat perubahan yang lebih baik. Tetapi terdapat program yang tidak sesuai dengan kondisi daerah perbatasan saat ini. Kurangnya pemuda di daerah perbatasan disebabkan oleh tidak adanya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia, hal ini membuat banyak pemuda di daerah perbatasan mencari pekerjaan ke negara tetangga yaitu Malaysia. Selain mudah mendapatkan pekerjaan di Malaysia,



pendapatan yang diterima jika bekerja di Malaysia juga lebih banyak daripada pendapatan yang diterima jika bekerja di Indonesia. Dengan keadaan seperti ini pemuda di perbatasan semakin berkurang dan program organisasi kepemudaan yang telah dibuat oleh pemerintah hanya sia-sia. Sehingga sampai saat ini program tersebut tidak bisa berjalan dengan optimal.

4. Para pelaksana kebijakan telah disebutkan dengan jelas atau belum

Pelaksana kebijakan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Siding, dan yang bertanggung jawab terhadap kebijakan pemberdayaan masyarakat adalah Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan pelaksana kebijakan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut menghasilkan prioritas program

yang telah disesuaikan dengan kondisi daerah serta visi dan misi.

5. Sumber daya yang memadai untuk mendukung kebijakan Untuk mendukung agar kebijakan yang telah dibuat dapat berjalan dengan optimal, dibutuhkan sumber daya yang memadai. Sumber daya manusia memegang peranan penting untuk tercapainya tujuan DPMPD, kurangnya sumber daya manusia membuat pelaksanaan kegiatan di kantor ataupun di lapangan menjadi terhambat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan efektif. Agar tercapainya tujuan yang lebih baik, dibutuhkan sumber daya yang mencukupi dan mempunyai kemampuan yang handal dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah kapasitas aparatur yang belum memadai. Masih kurangnya jumlah staf menjadi permasalahan internal yang dihadapi DPMPD dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya. Walaupun masih kurangnya kualitas sumber daya manusia di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, namun dengan profesionalisme dari aparatur dan memanfaatkan apa yang sudah ada, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPMPD selalu berusaha agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

#### 5.5.I. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan kekuatan dan kemandirian kepada seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan masyarakat.

##### 1. Jaminan Ekonomi dan Kontribusi Terhadap Keluarga

Meningkatkan perekonomian masyarakat merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, masyarakat diharapkan mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga bisa sejajar dengan negara tetangga. Namun dalam kenyataannya, peningkatan

perekonomian yang diharapkan oleh pemerintah masih belum terwujud, perekonomian masyarakat disana masih belum ada peningkatan jika dibandingkan dengan Desa atau Kecamatan lain yang ada di Kec Siding, apalagi jikadibandingkan dengan Negara Malaysia yang tidak lain adalah Negara tetangga.

Berdasarkan wawancara di atas, tidak ada kemajuan dalam bidang ekonomi disebabkan oleh sarana dan prasarana yang tidak memadai, permasalahan utama yang dihadapi masyarakat perbatasan adalah kondisi jalan yang susah dilalui sehingga membuat masyarakat kesulitan untuk menjangkau Kecamatan ataupun Kabupaten.

##### 2. Keterlibatan Dalam Kampanye dan Protes-protes

Ketika penulis datang langsung ke daerah perbatasan, terdapat bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan yang diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun masyarakat mengatakan terdapat penyalahgunaan bantuan social tersebut.

Ketika peneliti menanyakan hal tersebut, justru masyarakat banyak menyampaikan protes terhadap peneliti. Dalam hal ini, masyarakat masih belum berani melakukan protes secara langsung mengenai penerimaan bantuan sosial tersebut.

### 3. Kemampuan Membeli Komoditas Kecil

Masyarakat perbatasan atau tertinggal lebih memilih pergi ke Kabupaten lain bahkan ada yang kenegara tetangga Malaysia walaupun mau ke Kabupaten atau Kecamatan jarak yang tempuh harus menempuh waktu satu setengah hari itupun kalau cuaca bersahabat atau musim panas. Untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti membeli beras, minyak goreng, bumbu dapur. Sulitnya akses menuju pasar di kecamatan membuat masyarakat enggan untuk pergi ke kecamatan. Permasalahan utama yaitu transportasi, tidak semua masyarakat memiliki kendaraan. Walaupun memiliki kendaraan pribadi membutuhkan waktu satu hari untuk sekedar ke pasar. Hal ini dikarenakan kondisi jalan yang

sangat rusak, sehingga sangat susah untuk dilewati kendaraan.

Gambar 3.1 Jalan menuju Kecamatan



Sumber: Observasi Lapangan Peneliti

Untuk menuju negara Malaysia dibutuhkan waktu empat jam dengan berjalan kaki melewati bukit, karena mobil ataupun motor tidak bisa melewati bukit tersebut. Tentu banyak masyarakat memilih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya di Malaysia, selain tidak ada biaya transportasi, harga kebutuhan pokok di Malaysia juga lebih terjangkau dibandingkan dengan di Indonesia.

### 4. Kemampuan Membeli Komoditas Besar

Sama halnya dengan membeli komoditas kecil, untuk memenuhi kebutuhan komoditas besar seperti TV, radio dan pakaian keluarga, masyarakat daerah perbatasan juga

bergantung kepada negara Malaysia. Jika tidak mampu membawa barang belanjaan bisa menggunakan jasa pikul dengan menyewa seseorang untuk membawa barang belanjaan yang akan dibawa ke Indonesia.

Gambar 3.2 Masyarakat yang baru datang dari Kecamatan



Sumber: Observasi Lapangan Peneliti

## 5. Kesadaran Hukum dan Politik

Wilayah perbatasan yang jauh dari pusat kota tidak membuat masyarakat perbatasan acuh terhadap pemerintahan Indonesia. Masyarakat masih tetap setia mengibarkan bendera merah putih, rasa cinta terhadap tanah air Indonesia masih dirasakan ketika penulis pertama kali menginjakkan kaki di daerah perbatasan.

Walaupun bukan hari kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa masyarakat yang masih mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah maupun di ladang. Masyarakat perbatasan juga masih sadar akan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini ditandai dengan kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa yang menjadi pemimpin di desa tersebut beserta aparat desa yang lain.

### 5.6.I. Faktor dan Hambatan Yang Dihadapi Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

#### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting untuk tercapainya tujuan BPMPD, kurangnya sumber daya manusia membuat pelaksanaan kegiatan di kantor ataupun di lapangan menjadi terhambat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan efektif. Agar tercapainya tujuan yang lebih baik, dibutuhkan sumber daya yang mencukupi dan mempunyai kemampuan yang handal dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah kapasitas aparatur yang belum memadai. Masih kurangnya jumlah staf menjadi permasalahan internal yang dihadapi BPMPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Walaupun masih kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, namun dengan profesionalisme dari aparatur dan memanfaatkan apa yang sudah ada, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPMPD bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

## 2. Sarana dan Prasarana

Kendala yang dihadapi oleh DPMPD adalah sarana dan prasarana yang belum memadai. Untuk langsung meninjau lokasi Desa perbatasan BPMPD membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit.

Untuk menuju Desa perbatasan membutuhkan waktu yang cukup lama, dalam hal ini peneliti menuju Desa Sungkung II Kecamatan Siding

membutuhkan waktu sepuluh jam perjalanan darat dengan kondisi jalan yang sangat buruk, tidak ada jalan aspal di sepanjang jalan menuju perbatasan.

Gambar 3.3 Jalan menuju perbatasan



Sumber: Observasi Lapangan Peneliti

Jalan darat merupakan satu-satunya akses yang digunakan untuk menuju daerah perbatasan, dengan kondisi jalan yang rusak berat membuat daerah perbatasan menjadi sangat susah untuk di jangkau. Permasalahan kondisi jalan yang buruk memang menjadi permasalahan yang tiada hentinya, sehingga membuat daerah perbatasan menjadi daerah yang dianggap tertinggal, terisolir dan terbelakang.

Jika musim hujan tiba jalan menjadi berlumpur dan membuat masyarakat terpaksa harus melewati jembatan yang dibuat dari bamboo tidak semua kendaraan bisa melewati jalan tersebut, kondisi tersebut diperparah dengan banjir yang mengakibatkan jalan terputus. Dalam hal ini peneliti melewati beberapa titik banjir yang membuat perjalanan harus tertunda karena kondisi air yang cukup dalam.

Gambar 3.4 Jalan menuju Kecamatan yang melewati jembatan dari bamboo



Sumber: Observasi Lapangan Peneliti

### 3. Permasalahan Ekonomi di Perbatasan

Meningkatkan perekonomian masyarakat merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, masyarakat diharapkan mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga bisa sejajar dengan negara tetangga. Namun dalam kenyataannya, peningkatan perekonomian yang diharapkan oleh pemerintah masih belum terwujud, perekonomian masyarakat disana masih belum ada peningkatan jika dibandingkan dengan Desa atau Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bengkayang, apalagi jika dibandingkan dengan Negara Malaysia yang tidak lain adalah Negara tetangga.

Jalan yang rusak parah membuat masyarakat perbatasan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk sekedar belanja kebutuhan sehari-hari banyak masyarakat perbatasan yang pergi ke Malaysia, selain karena biaya transportasi yang murah, harga kebutuhan pokok di Malaysia juga lebih murah jika dibandingkan dengan Indonesia.

#### 4. Pekerjaan

Berladang dan berkebun merupakan pekerjaan masyarakat perbatasan yang masih menjadi tradisi sampai saat ini, berladang dengan menanam padi maupun lada. Namun, berladang yang dilakukan masyarakat perbatasan merupakan berladang dengan cara yang berpindah-pindah sehingga dilarang oleh Pemerintah. Kebiasaan berladang masyarakat yang berpindah-pindah membuat masyarakat membuka lahan baru untuk kegiatan berladangnya, sehingga cara tersebut dilarang oleh pemerintah.

Namun pemerintah tidak memberikan jalan keluar mengenai permasalahan ini, masyarakat mengharapkan pemerintah memberikan bantuan berupa pembuatan sawah lahan kering agar memudahkan masyarakat dalam bercocok tanam, namun sampai sekarang belum ada tanggapan maupun respon dari pemerintah mengenai permintaan masyarakat ini.

Permasalahan selanjutnya yang dialami oleh masyarakat perbatasan adalah rendahnya harga karet dan

lada, sehingga membuat masyarakat kesusahan untuk menjual hasil perkebunan mereka. Di samping harga yang rendah, masyarakat juga dihadapkan pada permasalahan sarana dan prasarana, hasil penjualan tidak sebanding dengan biaya transportasi yang dikeluarkan jika ingin menjual hasil perkebunan mereka ke Kecamatan atau Kabupaten.

Selain berladang dan berkebun, banyak masyarakat yang mencari pekerjaan di Malaysia, susah mencari pekerjaan di Indonesia membuat masyarakat memilih untuk mencari pekerjaan ke Malaysia. Selain biaya transportasi untuk menuju Negara Malaysia yang terjangkau, masyarakat juga mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan Indonesia.

Mudahnya akses untuk menuju Negara Malaysia membuat banyak masyarakat perbatasan yang pergi mencari pekerjaan di Malaysia. Masyarakat juga tidak perlu menggunakan paspor untuk masuk ke wilayah Malaysia, karena akses yang digunakan untuk menuju

Negara Malaysia hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki selama 3-4 jam, tidak ada satu pun kendaraan yang bisa melewati jalan ini karena harus naik turun melewati sebuah bukit dan menyeberangi sungai.

#### 5. Bantuan Sosial

Masyarakat perbatasan mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk bahan bangunan berupa semen, paku dan seng, bantuan tersebut langsung diterima masyarakat dari Pemerintah Kabupaten, berdasarkan wawancara dengan masyarakat setempat, banyak terjadi kejanggalan dalam pemberian bantuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan harga barang yang diterima oleh masyarakat, hal ini membuat masyarakat kecewa dengan bantuan yang ada, masyarakat bahkan diberikan kwitansi kosong yang harus ditanda tangani. Tidak adanya pengawasan dari Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat membuat kejadian seperti ini akan terulang kembali, rendahnya pendidikan dan minimnya informasi

mengenai bantuan membuat masyarakat tidak berani menyatakan pendapatnya, masyarakat juga bingung harus mengadu kemana mengenai permasalahan yang terjadi di perbatasan ini.

Bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu, tetapi dalam kenyataannya masih ada masyarakat yang menerima bantuan walaupun orang tersebut mampu. Sosialisasi kepada masyarakat juga tidak ada. Bantuan yang diterima oleh masyarakat langsung diserahkan oleh Pemerintah tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu, bantuan tersebut juga tidak melewati Kepala Desa sehingga masih ada masyarakat yang mampu tetapi menerima bantuan tersebut. Jika kejadian seperti ini masih terus terjadi, mengakibatkan wilayah perbatasan sulit untuk bisa berkembang,

kurangnya perhatian Pemerintah membuat wilayah perbatasan dianggap terisolir dan tertinggal. Hal tersebut memang benar adanya dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat ataupun pemerintah



mengenai pentingnya kemajuan wilayah perbatasan.

#### 6. Kantor Desa

Kantor desa sejatinya tidak hanya sekedar bangunan yang berdiri di suatu desa. Lebih dari itu, kantor desa merupakan tempat di mana kepala desa beserta perangkat desa lainnya mengurus, mengatur dan melayani desa serta masyarakat. Kantor desa juga merupakan pusat pemerintahan dan pelayanan publik yang ada di desa, dimana warga dengan pemimpin desa, dari kepala desa hingga aparat desa saling berinteraksi. Di daerah perbatasan atau tertinggal khususnya desa Sungkung II tidak memiliki kantor desa untuk digunakan. Namun, fakta yang terjadi adalah kantor desanya rumah pribadi kepala dusun dijadikan sebagai kantor desa dan selalu tutup walaupun di hari kerja. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap layanan surat menyurat menjadi terhambat karena kantor desa yang tidak ada.

Tidak adanya kantor desa membuat koordinasi antar aparatur desa sulit dilakukan. Tanpa adanya

koordinasi, desa akan sulit untuk berkembang serta tidak bisa bermanfaat secara optimal. Desa tidak hanya berfungsi sebagai administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki fungsi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, karena melayani desa merupakan langkah awal untuk memajukan wilayah perbatasan dan membangun Indonesia menjadi lebih baik.

#### E. PENUTUP

##### 6.1 Kesimpulan

##### 6.1. Kesimpulan

Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menghasilkan beberapa program untuk desa maupun desa di perbatasan, program tersebut disesuaikan dengan kondisi daerah serta melihat visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Namun, tidak semua program yang dibuat tersebut berjalan dengan optimal, bahkan hanya beberapa program saja yang berhasil berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan oleh kendala yang dihadapi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta permasalahan yang terjadi di

Perbatasan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penilaian lomba desa /kelurahan tingkat Kabupaten. Hingga saat ini program tersebut tidak berjalan.
- b. Program PNPM mandiri perdesaan. Program yang sekarang menjadi program Generasi Sehat Cerdas hingga saat ini masih berjalan dengan baik.
- c. Penyusunan buku profil desa, kelurahan dan kecamatan. Program tersebut tidak berjalan dengan optimal, hanya desa saja yang memiliki profil desa, sedangkan kecamatan tidak memiliki profil kecamatan.
- d. Pencanaan bulan gotong royong. Hingga saat ini program tersebut tidak berjalan.
- e. Bimtek organisasi kepemudaan. Program ini tidak bisa berjalan dengan optimal dikarenakan banyak pemuda yang pergi ke Negara Malaysia untuk mencari pekerjaan.

Dalam melaksanakan proses pemberdayaan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengalami beberapa kendala, yaitu:

- a. Sumber daya manusia yang kurang memadai. Masih kurangnya jumlah aparatur menjadi permasalahan internal yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Sarana dan prasarana yang belum memadai. Untuk menuju daerah perbatasan membutuhkan waktu sepuluh jam menggunakan perjalanan darat dengan kondisi jalan yang sangat buruk, Jalan darat merupakan satu-satunya akses yang digunakan untuk menuju daerah perbatasan, dengan kondisi jalan yang rusak berat membuat daerah perbatasan menjadi sangat susah untuk di jangkau.

## 6.2. Saran

- a. Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai pembuat kebijakan

masih belum mampu mengubah kehidupan masyarakat daerah perbatasan menjadi lebih baik lagi, sehingga masih perlu dioptimalkan baik dari segi sumber daya manusianya maupun anggaran program yang minim. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia harus diperhatikan agar dalam pelaksanaan program dapat berjalan dengan optimal.

b. Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah kebijakan yang dibuat untuk seluruh desa termasuk desa di perbatasan, padahal kebutuhan desa biasa dengan desa di perbatasan berbeda, untuk kedepannya diharapkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa membuat kebijakan ataupun program yang secara khusus dibuat untuk desa perbatasan.

c. Bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat, hendaknya diawasi sampai bantuan sosial tersebut benar-benar telah diserahkan kepada masyarakat, hal ini untuk

memastikan tidak ada penyalahgunaan bantuan sosial tersebut.

d. Sarana dan Prasarana untuk menuju daerah perbatasan hingga saat ini masih memprihatinkan, untuk menuju daerah perbatasan dibutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit, untuk kedepannya pemerintah Kabupaten Bengkayang lebih memperhatikan permasalahan infrastruktur, jika infrastruktur baik maka tingkat perekonomian masyarakat perbatasan juga akan meningkat.

e. Kurangnya lapangan pekerjaan membuat banyak masyarakat daerah perbatasan memilih untuk pergi ke Malaysia, sehingga program yang dibuat oleh pemerintah menjadi tidak optimal. Pemerintah diharapkan memberi bimbingan ataupun pelatihan kepada masyarakat agar masyarakat bisa.

### 6.3. Keterbatasan Penelitian

Dalam hal ini, peneliti ingin mengungkapkan segala kelemahan yang ada pada diri peneliti. Baik dari

segi kelemahan dalam melaksanakan penelitian mengenai paradigma, model penelitian, keterbatasan tema atau topik penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data, biaya, tenaga dan sebagainya dengan ini adanya keterbatasan dalam penelitian ini harap dapat disempurnakan oleh peneliti selanjutnya.

#### F. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Saifuddin (2014). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Denhardt Janet V. & Denhardt Robert B (2013). *Pelayanan Publik Baru*. Bantul: Kreasi Wacana
- Fahrudin, Adi (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Hamdi, muchlis (2015). *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Herdiansyah, Haris (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato (2015). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy J (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Soetomo (2006). *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syafiie, Inu Kencana (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju
- Yusuf, Muri (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan*. Jakarta: Kencana
- Zubaedi (2014). *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Kencana
- JURNAL
- Abdullah, Irwan dan Intan Pemata Sari. (2014). Politik Identitas Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia: Kasus Badau di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. *Kawistara*, Vol. 4, No. 3, 225-330
- Alam, Syamsu. (2012). Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 3, 78-92
- Aneta, Asna. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *Jurnal*

*Administrasi Publik*, Vol. 1,  
No. 1, 55-65

Phaksy Sukowati, Nuryatin dkk  
(2012). Implementasi  
Kebijakan Pelayanan  
Kesehatan Masyarakat  
Miskin Nonkuota  
(Jamkesda dan Spm).  
*Jurnal Administrasi Publik*,  
Vol. 1, No. 6, 1195-1202

Prasojo, Zaenuddin Hudi. (2013).  
Dinamika Masyarakat  
Lokal di Perbatasan. Vol.  
21, No. 2, 417-437

Rahmawati, Iva dan Fauzan.  
(2012). Problem Diplomasi  
Perbatasan dalam Tata  
Kelola Perbatasan Indonesia-  
Malaysia. *Jurnal Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik*, Vol. 16,  
No. 2, 95-109

Sutaat. (2012). Pemberdayaan  
Masyarakat Daerah  
Perbatasan Antar Negara.  
*Sosiokonsepsia*, Vol. 17, No.  
01, 52-71

#### SUMBER INTERNET

noname. (2020, maret 25). *about to.  
profil wilayah*. Retrieved from  
profil wilayah:  
<http://www.Bengkayang.go.id>

Suryana(2010) *Metodologi  
penelitian*. (Online),

([http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/P  
RODI.\\_MANAJEMEN\\_FPEB/  
196\\_006021986011-  
SURYANA/FILE\\_\\_7.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/P<br/>RODI._MANAJEMEN_FPEB/<br/>196_006021986011-<br/>SURYANA/FILE__7.pdf),  
diakses 2 juni 2020).